

ABSTRAK

Judul : Klaim Variation Order Pada Jenis Kontrak Design And Build Lumpsum di Proyek Pemerintah. (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Pelayanan Kanker Terpadu RSUP Fatmawati). Nama : Amara Heramonica, NIM : 41119010115, Dosen Pembimbing : Ir. Ernanda Dharmapribadi ,M.M.

Variation order dapat disebabkan dari berbagai pihak yang terkait pada pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini yang menyebabkan perubahan perencanaan sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan awal dan biaya yang telah ditentukan. Untuk mengetahui penyebab variation order dilakukan dengan metode analisis deskriptif dan analisis data. Dari hasil penelitian didapatkan urutan ranking faktor-faktor yang menjadi penyebab variation order. Dampak variation order dikaji pada data dokumen kontrak addendum untuk mengetahui berapa besar penambahan biaya yang terjadi akibat adanya variation order yang dituangkan dalam bentuk tabel dan grafik dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mempercepat perhitungan dan penjumlahan.

Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, karena penelitian ini menganalisis kontraktual yang lebih sederhana menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data didapat, dibuat analisis factor permasalahan dalam mengklaim kontraktual untuk menemukan perbandingan keuntungan dan kerugian menggunakan software Ms.Excel agar mendapatkan perbandingan biaya dan waktu kerja yang lebih cepat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses klaim variation order pada proyek design and build bias dilakukan jika mengacu pada perpres No 16 Tahun 2018 dan Permen PUPR No 1 Tahun 2020. Prosedur klaim pada proyek timbul pekerjaan tanah yang disebabkan oleh perbedaan data penyelidikan tanah basic design dengan penyelidikan tanah actual dan mengakibatkan banyak perubahan dengan ini penyelesaiannya mengklaim peraturan perundang-undangan tentang Bab perubahan kontrak serta merubah atau menghitung ulang RAB agar tidak terjadi kekeliruan atau kerugian pada kontrak dikarenakan perubahan dilakukan oleh owner Penyelesaian disimpulkan apabila owner tidak mau mengakui pekerjaan tambah karena sifat kontrak lumpsum, dan menganggap perubahan tersebut merupakan bagian dari kontrak rancang bangun dengan mengklaim gambar awal tender yang telah disetujui owner dan melakukan justifikasi teknis serta mengajukan surat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan belum mendapatkan respon dari owned an MK, maka kontraktor mengusulkan untuk pendampingan dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) terkait perubahan dan melalui pendampingan selama +/- 2 bulan, melalui kajian.

Kata kunci : pekerjaan tambah, rancang bangun, kontrak, lumpsum, perubahan disain

ABSTRACT

Title : Claim Variation Order On Type Of Contract Design And Build Lumpsum In Government Projects. (Case Study: Development Plan Project for Integrated Cancer Service Building at Fatmawati Hospital). Name : Amara Heramonica, NIM : 41119010115, Advisor : Ir. Ernanda Dharmapribadi, M.M.

Variation orders can be caused by various parties involved in the implementation of construction projects. This causes changes in planning so that the implementation of the work is not in accordance with the initial planning and predetermined costs. To find out the causes of variation orders, descriptive analysis and data analysis methods are used. From the results of the study obtained a ranking order of factors that cause variation orders. The impact of variation orders is reviewed on addendum contract document data to find out how much additional costs occur due to variation orders as outlined in tables and graphs using Microsoft Excel to speed up calculations and additions.

The method in this study is a quantitative method, because this study analyzes a simpler contractual using primary data and secondary data. After the data is obtained, a factor analysis of the problem in contracting claims is made to find a comparison of advantages and disadvantages using Ms. Excel software in order to get a faster comparison of costs and working time.

The results of this study indicate that the variation order claim process on design and build projects can be carried out when referring to Presidential Decree No. 16 of 2018 and PUPR Ministerial Regulation No. 1 of 2020. The claim procedure for earthwork projects arises due to differences in basic design soil investigation data with investigations actual land and resulted in many changes with this settlement claiming the laws and regulations regarding the Chapter on contract changes and changing or recalculating the RAB so that there are no mistakes or losses in the contract due to changes made by the owner. The settlement is concluded if the owner does not want to admit additional work due to the nature of the contract lump sum, and considers these changes to be part of the design and build contract by claiming the initial tender drawings that have been approved by the owner and carrying out technical justification and submitting a PPK letter (Commitment Making Officer) and have not received a response from the owned an MK, then the contractor proposes for assistance from the BPKP (Financial and Development Supervisory Agency) regarding changes and through assistance for +/- 2 months, through studies.

Kata kunci : variation order, design build, contract, lumpsum, design changes